

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Jumat, 26 Februari 2021



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media online dan media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas.com	Jumat, 26 Februari 2021	Selain Labuan Bajo, Tiga Kawasan di Kupang Ikut Dipercantik	Selain Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga tengah menata tiga kawasan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). https://properti.kompas.com/read/2021/02/25/180000321/selain-labuan-bajo-tiga-kawasan-di-kupang-ikut-dipercantik. https://www.antaranews.com/berita/2016387/lengkapi-dpsp-labuan-bajo-pupr-tata-3-kawasan-wisata-kota-kupang-ntt
2	Suara.com	Jumat, 26 Februari 2021	Soal Penanganan Banjir di Wilayah Sungai, Menteri PUPR: Harus Ditangani Sistemik	Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan penanganan di hulu Sungai Citarum sebagai salah satu cara penanganan banjir sistemik. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menilai penanganan banjir di suatu wilayah sungai harus dikerjakan secara sistemik dari hulu sampai ke hilir. https://www.jpnn.com/news/soal-penanganan-banjir-di-wilayah-sungai-menteri-pupr-harus-ditangani-sistemik https://www.jawapos.com/infrastruktur/25/02/2021/menteri-pupr-sebut-penanganan-banjir-di-wilayah-sungai-harus-sistemik/?page=all
3	Antaranews.com	Jumat, 26 Februari 2021	PUPR: Konstruksi tol Akses Bandara Kertajati sekitar 53-56 persen	Kementerian PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengungkapkan bahwa progres Konstruksi tol Akses Bandara Kertajati mencapai sekitar 53-56 persen. https://www.antaranews.com/berita/2016954/pupr-konstruksi-tol-akses-bandara-kertajati-sekitar-53-56-persen
4	pikiran-rakyat.com	Jumat, 26 Februari 2021	Normalisasi Sungai di Jakarta Bakal Dilanjutkan Tahun Ini	Staf Khusus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Firdaus Ali mengklaim semua program normalisasi sungai di Jakarta berhenti sejak tahun 2017. https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011494140/normalisasi-sungai-di-jakarta-bakal-dilanjutkan-tahun-ini-stafsus-pupr-anies-baswedan-baru-sadar

Judul	Developer Minta Kuota Ditambah Lagi	Tanggal	26 Februari 2021
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 21)		
Resume	Pemerintah diminta menaikkan lagi kuota bantuan pembiayaan perumahan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada 2022 menjadi 230.000 unit dari usulan sebanyak 200.000 unit		

| RUMAH BERSUBSIDI |

DEVELOPER MINTA KUOTA DITAMBAH LAGI

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah diminta menaikkan lagi kuota bantuan pembiayaan perumahan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada 2022 menjadi 230.000 unit dari usulan sebanyak 200.000 unit.

Visual: Putra
pmba.pembinaan@bisnis.com

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Perumahan dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawiandjaja mengatakan permintaan itu memperhitungkan pencapaian pada 2018 dengan realisasi rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mencapai 263.000 unit. Perinciannya 225.000 unit rumah Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan 38.000 unit FLPP.

Dia menilai alokasi FLPP pada 2022 sebesar Rp23 triliun bagi 200.000 unit rumah subsidi sangat kurang. Alasannya, bantuan pembangunan rumah FLPP pada 2020 tercapai 190.000 unit.

"Mestinya tahun depan diperkirakan bisa mencapai 225.000 unit hingga 230.000 unit," katanya kepada Bisnis, Kamis (25/2).

Menurutnya, segmen rumah MBR cukup diminati oleh para pengembang properti. Hal itu mengacu kebutuhan rumah MBR selalu ada meskipun marginnya tidak sebesar segmen rumah non-MBR.

Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Perumahan Seluruh Indonesia (Aperis) Daniel Djumali memproyeksikan pembangunan perumahan untuk MBR berpeluang mencapai lebih dari 200.000 unit pada tahun depan. Dia menilai kebutuhan MBR untuk memiliki rumah masih sangat tinggi.

"Kalau pandemi Covid-19 ini membaik, pembangunan rumah dengan skema FLPP bisa lebih dari 200.000 unit. Tahun ini saja akan bisa capai 200.000 unit," kata Daniel.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Apemas) Jaya Andre Bangsanon menilai kenaikan kuota FLPP pada tahun depan sudah sesuai dengan permintaan asosiasi.

"Saya rasa tahun depan bisa lebih dari 200.000 unit. Tapi usulan kenaikan bantuan pembiayaan perumahan dengan skema FLPP ini sudah sesuai dengan permintaan kami

agar ada penambahan jumlah rumah FLPP," tuturnya.

Dalam kesempatan lain, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko D. Heripowanto mengatakan para pengembang properti yang serius menggarap proyek rumah bersubsidi pada tahun depan bisa menyiapkan amunisi sejak dini.

Alasannya, Kementerian PUPR sudah melansir usulan bantuan pembiayaan perumahan dengan skema FLPP periode 2022 dengan nilai Rp23 triliun untuk pengadaan 200.000 unit rumah bersubsidi.

Nilai usulan itu meningkat 38% dibandingkan dengan alokasi FLPP tahun 2021 yang hanya Rp 16,6 triliun untuk 157.500 unit rumah.

"Di tahun 2022 nanti bantuan FLPP akan disalurkan sebanyak 200.000 unit dengan anggaran Rp23 triliun. Ini naik dari tahun ini yang 157.500 unit. Namun, hal ini masih proses," ujarnya, Rabu (24/2).

Alokasi anggaran FLPP tersebut disalurkan untuk didapat dari dana bergulir sebesar Rp3,9 triliun dan usulan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2022 sebesar Rp19,1 triliun.

Selain itu, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) pada 2022 yang disalurkan Kementerian PUPR untuk 312 unit rumah.

Selanjutnya, bantuan SSB pada 2022 disalurkan sebesar Rp4,39 triliun bagi 769.903 unit rumah. SSB 2022 yang dibayarkan ini untuk tahun sebelumnya.

Kementerian PUPR juga mengusulkan usulan bagi Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) 2022 sebesar Rp800 miliar untuk 200.000 unit rumah.

MULAI DIBAHAS

Dia menilai anggaran FLPP 2022 sudah mulai dibahas kementerian PUPR untuk 2021 baru dijalankan.

"Jadi, sampai dengan nanti ta-



Barisan melintas di proyek pembangunan rumah bersubsidi di Kliparengkul, Kabupaten Bojonegara, belum lama ini.

hun 2022, kalau pengembang mau berancang-ancang untuk memulai lagi, misalnya, di mana sekarang tidak memungkinkan, maka untuk tahun depan sudah kami siapkan," tutur Eko.

Dia melanjutkan Kementerian PUPR fokus pada pengembangan dan kemudahan pembiayaan perumahan MBR sebagai upaya untuk membangkitkan sektor properti.

Eko mengatakan sektor properti akan menjadi leading sector baik pada saat ini maupun pada masa akan datang.

Sektor properti diakui sebagai salah satu sektor yang penting karena mampu menarik dan mendorong kegiatan di berbagai sektor ekonomi.

Hal itu karena sektor turnarnya yakni mulai dari sektor jasa, bahan bangunan, hingga mempengaruhi sektor keuangan dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta lapangan pekerjaan.

"Begitu pula saat pandemi Covid-19 salah satu sektor yang terdampak adalah sektor perumahan," ujarnya.

Oleh karena itu, Kementerian PUPR akan fokus dalam memberikan kemudahan dan pembiayaan perumahan untuk masyarakat

yang berpenghasilan rendah.

Selama ini, para pengembang ketika melakukan pameran hanya mempromosikan gonggong menengah hingga menengah ke atas.

"Biasanya kalau untuk masyarakat berpenghasilan rendah para pengembang tidak memerlukan forum untuk melakukan pameran baik secara fisik maupun virtual, karena demand dari masyarakat berpenghasilan rendah ini cukup tinggi, jauh lebih besar daripada supply-nya," kata Eko.

Pada 2021, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk dana FLPP sebesar Rp16,66 triliun bagi 157.500 unit rumah subsidi pada 2021.

Untuk BP2BT dianggarkan sebesar Rp8,7 miliar untuk 218 unit tetapi alokasi anggaran ini bisa diperbesar sampai maksimal 66.750 unit.

Untuk bantuan SSB sebesar Rp5,96 triliun, yang digunakan bukan untuk pemberian KPR baru tetapi untuk membayar SSB ulang atau mengguling sejak 2015 untuk sebanyak 859.582 unit di mana Kementerian PUPR membayar untuk tahun kedua, ketiga dan seterusnya.

Lalu untuk SBUM disamakan jumlahnya untuk FLPP yakni 157.500 unit dengan jumlah anggarannya Rp630 miliar. SBUM untuk pemberian TA 2021 Rp4 juta ini termasuk untuk Papua

dan Papua Barat dengan uang muka sebesar Rp10 juta.

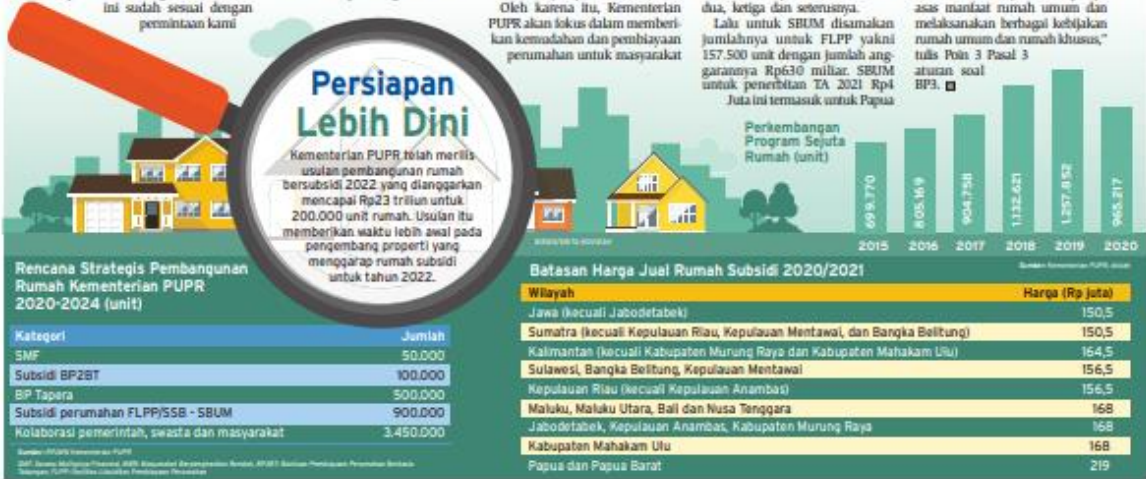
Sementara itu, Presiden Joko Widodo membentuk Badan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk mempercepat penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi MBR.

Pembentukan BP3 tertuang dalam aturan ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 9/2021 tentang Badan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perumahan yang ditetapkan pada 2 Februari 2021.

Beleid ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 50 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang (UU) No.11/2020 tentang Cipta Kerja.

BP3 merupakan lembaga non-struktural untuk mendukung percepatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

"Pembentukan BP3 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempercepat penyediaan rumah umum, menjamin bahwa rumah umum hanya dimiliki dan dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah, menjamin tercapainya asas manfaat rumah umum dan melaksanakan berbagai kebijakan rumah umum dan rumah khusus," tulis Poin 3 Pasal 3 aturan soal BP3. ■



Judul	Tolong Pak Jokowi, Beri Kami Jembatan	Tanggal	26 Februari 2021
Media	Kompas (Halaman, 1)		
Resume	Pada Januari 2021, anggota DPR asal Aceh, Irmawan, juga meninjau Desa Siron Blang. Ia berjanji mengusulkan pembangunan jembatan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berkas permohonan pembangunan kepada Kementerian PUPR juga telah disampaikan."Sedang diupayakan semoga masuk Rancangan APBN Perubahan 2021," katanya		

INFRASTRUKTUR

Tolong Pak Jokowi, Beri Kami Jembatan

Setelah jembatan gantung Desa Siron Blang di Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar, ambruk di-terjang banjir dua tahun silam, warga bertaruh nyawa menyeberangi de-rasnya Sungai Keu-mireu. Berjarak 15 kilometer dari kan-tor bupati dan 40 km dari kantor gu-bernur, suara hati warga seolah tak terdengar.

Zulkarnaini

Muhammad Rendi (10) dan teman-temannya pulang sekolah, Jumat (19/2/2021) siang. Mereka ber-jalan cepat menyusuri jalan berbatu karena teman lainnya

menunggu di tepi sungai.

Dengan cekatan, mereka melompat ke rakit bambu. Tangan kecil Rendi meraih tali tambang agar rakit berukuran 1,5 meter x 2 meter itu berge-rak menyeberangi sungai. Air sungai jernih, beberapa perem-puan terlihat mencuci pakaian.

"Bang, paman titi dipeupet? Neupeupet bak Pak Jokowi, joli titi ke kamoe (Bang, kapan jembatan dibangun? Tolong sampaikan ke Presiden Joko Widodo, beri kami jembatan)," ujar Rendi kepada Kompas, sambil menarik tali tambang.

Desa Siron Blang dibelah Sungai Keumireu. Jumlah penduduknya sekitar 300 orang. Terdapat dua dusun yang dipisahkan sungai, yakni Dusun Siron Cut yang dihuni sekitar 200 orang dan Dusun Siron Krung dihuni 100 orang. Dusun Siron Krung berada di sisi yang mudah diakses, se-kitar 10 kilometer dari jalan nasional Banda Aceh-Meula-boh. Sekolah dan fasilitas publik lainnya ada di dusun

(Sambungan ke hlm 15 kol 1-7)

Tolong Pak Jokowi, Beri Kami Jembatan

(Sambungan dari halaman 1)

itu. Sementara Dusun Siron Cut berada di sisi lain dari su-ngai. Akses paling mudah ke dusun itu dari Dusun Siron Krung adalah dengan menye-berangi sungai atau memutar sejauh belasan kilometer.

Dulu, antardusun itu dihu-bungkan dengan jembatan gantung sepanjang 80 meter dan lebar 1 meter. Jembatan sangat tua hingga akhir 2018 ambruk diterjang banjir. Bebe-rapa bulan kemudian, peme-rintah membantu pembangu-nan jembatan darurat dari ba-tang kelapa. Namun, jembatan itu juga ambruk akibat banjir.

Setelah jembatan darurat rusak, warga terpaksa menye-berangi sungai menggunakan rakit bambu. Jika air sedang surut, warga menyeberangi su-ngai tanpa alas kaki dengan

menyungki barang bawaan.

"Ada yang jatuh, buku-buku basah semua," ucap Rendi.

Jika air sedang naik, warga terpaksa menempuh jalan al-ternatif sejauh 15 km. "Kalau air besar, kami tidak sekolah," kata Rendi. Ia dan anak-anak di Desa Siron Blang, khusus-nya Dusun Siron Cut, berha-rap pemerintah segera mem-bangun jembatan untuk me-mudahkan mereka ke sekolah.

Aktivitas terhambat

Ketiadaan jembatan mem-buat warga tidak bisa berakti-vitas dengan leluasa. Riza Ju-liani (38), warga setempat, mengatakan, hasil kebun peta-ni pun sulit dijual ke luar du-sun. Yang terutama, ia khawa-tir keselamatan anaknya saat menyeberangi sungai ketika berangkat dan pulang sekolah. "Apalagi kalau sakit tengah

malam, susah sekali. Puskesmas jauh di seberang, harus menyeberang sungai tengah malam. Bahaya," kata Riza.

Di Desa Siron Blang tidak ada fasilitas kesehatan. Warga pun harus pergi ke pusat ke-camatan yang berjarak 15 km.

Pada Februari 2019, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali me-ninjau jembatan yang rusak. Dia ikut naik ke perahu karet membantu anak-anak menye-berang. Meski ia menyampaik-an bahwa pada 2020 jembat-an akan dibangun, hingga kini hal itu belum terealisasi.

Pada Januari 2021, anggota DPR asal Aceh, Irmawan, juga meninjau Desa Siron Blang. Ia berjanji mengusulkan pemban-gunan jembatan ke Kement-erian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Saya akan menyampaikan langsung kepada Menteri

PUPR untuk membangun jem-batan pada tahun ini," katanya.

Kepala Dinas PUPR Aceh Besar Syahril menuturkan, pembangunan jembatan di De-sa Siron Blang adalah kebutu-han mendesak bagi warga. Namun, Pemerintah Kabupa-ten Aceh Besar tak bisa mem-bangun jembatan itu karena beban APBD terlalu besar.

Pihaknya pernah mengusul-kan kepada Pemprov Aceh, tetapi ditolak dengan alasan pembangunan jembatan itu tanggung jawab Pemkab Aceh Besar. Pada 2019, pihaknya ju-ga mengusulkan pembangunan jembatan itu ke Balai Pelaksa-naan Jalan Nasional Aceh dan berharap pada tahun berikut-nya jembatan bisa dibangun.

Awalnya, Syahril menda-patkan kabar baik bahwa pem-bangunan jembatan itu dika-bulkan. Namun, belakangan

dia memperoleh kabar rencana pembangunan jembatan batal.

Berkas permohonan pema-ngunan kepada Kementerian PUPR juga telah disampaikan. "Sedang diupayakan semoga masuk Rancangan APBN Pe-rubahan 2021," katanya.

Kebutuhan anggaran pem-bangunan jembatan Siron Blang sekitar Rp 6 miliar. Me-nurut rencana, jembatan baru itu bisa dilalui kendaraan roda empat kapasitas terbatas. Se-tidaknya mobil bak terbuka bi-sa melewati jembatan beton itu. "Mudah-mudahan tahun ini terwujud," ujar Syahril.

Dana otsus

Sebagai provinsi penerima dana otonomi khusus (otsus), Aceh sebenarnya memiliki anggaran cukup untuk mem-bangun jembatan itu. Pada 2008-2020, Aceh menerima

dana otsus Rp 73 triliun. Bah-kan, Pemprov Aceh pada 2019 membeli 172 mobil dinas, total seharga Rp 100 miliar.

Meski dana otsus cukup be-sar, Koordinator Masyarakat Transparansi Anggaran Aceh Alfian menilai, pembangunan di Aceh sebagian tidak sesuai dengan kebutuhan publik. In-frastruktur yang sudah diba-ngun pun terbengkalai. Misal-nya, kompleks terminal angku-tan umum di Saree, Aceh Besar, kini tidak digunakan. Padahal, terminal itu dibangun dengan dana Rp 7 miliar.

Di sisi lain, tidak jauh dari Saree, warga Desa Siron Blang harus menyeberangi sungai dengan rakit bambu karena jembatan yang mereka butuh-kan tidak kunjung dibangun. Alfian menambahkan, fasi-litas yang digunakan oleh pe-jabat sangat kontras dengan

pembangunan bagi rakyat. Pe-jabat diberikan kendaraan di-nas, tunjangan, dan akses, tetapi warga dibiarkan hidup terisolasi bertahun-tahun.

Ketidakadilan pembangunan menyebabkan angka kemiskin-an di Aceh masih tinggi. Pada September 2020, jumlah pen-duduk miskin di Aceh 833.000 jiwa atau 15,34 persen. "Pem-bangunan lebih banyak sesuai keinginan pejabat, bukan ke-butuhan rakyat," kata Alfian.

Padahal, untuk mengatasi kendala akses jalan bagi warga Siron Blang, jembatan darurat yang lebih sederhana bisa di-bangun beton senilai Rp 6 miliar bisa dibangun belakangan.

Tak heran, Rendi pun sam-pai minta pesannya disampaik-kan kepada Presiden agar jembatan di desanya segera dibangun.